



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata cara pelaksanaan pemindah tanganan Barang Milik Negara;

b. Bahwa dalam penghapusan/penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik Negara,perlu menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Pejabat Barang Milik Negara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Persetujuan KPU RI Nomor : 712/RT.01.3-SD/05/2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik/Kekayaan Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, yaitu:
1. Nama : AGUSSALIM, SH
NIP : 19730203 200812 1 001

Jabatan : Kasubag Keuangan umum dan Logistik
2. Nama : HASBAR KURNIAWAN
NIP : 19801011 200701 1 001
Jabatan : Staf SubBagian Keuangan Umum dan Logistik

- KEDUA : Pejabat Penjual Barang Milik Negara wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Meneliti dan Memeriksa Barang Milik Negara yang akan dihapus Secara Online;
 2. Melaksanakan Tindak Lanjut Pelelangan sesuai Keputusan Penghapusan yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 3. Hasil dari Pelelangan Barang Milik Negara dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini serta tindaklanjutnya di bebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

ttd.

RESMIATI

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti